

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah pembangunan ekonomi bukanlah persoalan baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Usaha-usaha pembangunan yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam usaha untuk memecahkan masalah pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Hal ini juga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan usaha dalam rangka pendayagunaan potensi daerah terutama sumber daya alamnya guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan dibuat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (peningkatan pendapatan perkapita), perbaikan kelembagaan, pemerataan distribusi pendapatan dan meningkatkan hubungan ekonomi regional (Arsyad, 2004: 11-12). Dengan kata lain bahwa pembangunan ekonomi adalah

mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat.

Krisis yang terjadi pada Indonesia tahun 1997 tidak hanya membawa dampak ekonomi saja tapi pada berbagai aktivitas kehidupan baik kehidupan berbangsa maupun bernegara yang lebih dikenal dengan krisis multi dimensi. Krisis yang tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat tetapi juga berpengaruh pada kehidupan aktivitas pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2002: 167)

Salah satu indikator penting guna menganalisa pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan *output* dalam suatu perekonomian. Indikator ini juga memberikan gambaran sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada periode tertentu telah menghasilkan tambahan produksi/pendapatan bagi masyarakat.

Dalam era otonomi daerah dimana terdapat desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk menentukan pola dan prioritas pembangunan maka beberapa daerah menetapkan pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi oleh pemerintah melalui dana pembangunan dan merangsang pertumbuhan investasi swasta yang diharapkan mempunyai *efek multiplier* terhadap penyerapan tenaga kerja. Otonomi daerah diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah. Adanya otonomi, daerah diberikan keleluasaan dalam pembangunan daerah melalui usaha-

usaha yang sejauh mungkin meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung 2 misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu: menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

PDRB merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi di daerah (Arsyad, 2004:298). Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil.

**Tabel 1.1.**

**Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NAD 2001-2007  
Atas Dasar Konstan 2000**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>%</b>
2001	31,268,170.03	-
2002	38,465,111.10	23.02
2003	40,988,839.21	6.56
2004	41,916,906.15	2.26
2005	44,071,055.32	5.14
2006	46,078,093.00	4.55
2007	47,728,249.90	3.58

*Sumber: BPS NAD, NAD dalam angka, (data diolah)*

Tabel I.1 di atas menggambarkan pertumbuhan ekonomi NAD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998 silam. Pertumbuhan ekonomi NAD atas dasar harga konstan tahun 2000 dalam kurun waktu 2001-2007 berfluktuatif. Tahun 2002 pertumbuhan sebesar 23,02%, tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 6,56%. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 2,26%, tahun 2005 mpun mengalami pertumbuhan sebesar 5,14%, pada tahun 2006 kembali mengalami kenaikan sebesar 4,55% dan pada tahun 2007 juga tumbuh

sebesar 3,58%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD tersebut dikarenakan berbagai keadaan yang dihadapi daerah tersebut mulai membaik yang mempengaruhi PDRB NAD.

**Tabel I.2**  
**Jumlah PDRB Provinsi NAD Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2007**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	Tahun						
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	7,662.09	7,648.85	7,911.03	8,068.98	7,754.98	7,732.78	8,262.81
2	Pertambangan & Penggalian	8,819.24	11,705.88	12,155.58	14,263.94	15,489.93	16,244.92	17,243.96
3	Industri Pengolahan	6,108.76	7,122.73	7,237.89	7,407.25	5,755.45	4,996.61	4,491.75
4	Listrik & Air Minum	44.59	43.18	50.51	60.38	59.20	66.34	82.06
5	Bangunan & Konstruksi	1,312.30	1,486.53	1,500.58	1,514.43	1,569.29	1,884.77	2,147.33
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4,773.91	4,877.78	4,997.60	4,986.75	5,186.54	5,571.09	5,665.98
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,432.55	1,484.16	1,550.83	1,561.65	1,734.88	1,925.57	2,136.46
8	Bank & Lemb Keu Lainnya	251.74	312.03	408.73	488.21	471.70	493.70	523.43
9	Jasa-jasa	2,159.90	2,279.72	2,426.56	4,190.71	4,595.26	4,798.10	5,484.32
	Jumlah	32,565.08	36,960.86	38,239.31	42,542.30	42,617.23	43,713.88	46,038.10

Sumber : BPS NAD, NAD dalam Angka, 2008 (data diolah)

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disingkat dengan NAD merupakan salah satu daerah yang meletakkan investasi sebagai landasan fundamental bagi pertumbuhan ekonominya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengalokasikan dana untuk berbagai proyek pembangunan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Dimana investasi swasta adalah dalam bentuk PMA dan PMDN serta investasi masyarakat lainnya. Sejalan dengan itu bermacam-macam kebijakan

diterapkan untuk mempermudah masuknya arus investasi swasta di Provinsi NAD baik investasi swasta asing maupun domestik.

**Tabel I.3**  
**Jumlah Investasi Riil Swasta PMDN & PMA**  
**Provinsi NAD 2001-2007 (Juta Rupiah)**

Sumber	Tahun						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PMDN	5,028.33	9,959.42	12,919.47	14,171.96	17,044.67	17,633.88	19,480.39
PMA	8,292.56	13,446.98	15,775.52	13,466.13	18,214.45	18,328.46	20,209.07
<b>Jumlah</b>	<b>13,320.89</b>	<b>23,406.40</b>	<b>28,694.99</b>	<b>27,638.09</b>	<b>35,259.12</b>	<b>35,962.34</b>	<b>39,689.46</b>

*Sumber : BPS NAD, NAD dalam Angka 2008 (data diolah)*

Pada tabel I.3 nampak jelas bahwa jumlah investasi swasta baik PMDN maupun PMA dari tahun ke tahun terus meningkat mulai dari 13.320,20 juta rupiah pada tahun 2001 menjadi 23.406,40 juta rupiah pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 menjadi 28.694,99 juta rupiah, tahun 2004 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya 27.638,09 juta rupiah, tahun 2005 kembali meningkat menjadi 35.259,12 juta rupiah dan juga pada tahun 2006 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 35.962,34, tahun 2007 terjadi peningkatan yang cukup berarti sebesar 39.689,46 juta rupiah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintahan daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004: 127). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, selain pengeluaran

pemerintahan juga dipengaruhi oleh serangkaian instrumen, diantaranya adalah investasi di daerah tersebut. Salah satu faktor yang dapat mendorong bertambahnya pengeluaran investasi adalah apabila suasana lingkungan bertambah optimis (Reksoprayitno, 2000: 47). Selain hal tersebut, salah satu pengaruh terhadap usaha investasi adalah kepercayaan dunia usaha terhadap prospek usahanya.

Investasi merupakan motor penggerak dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan kegiatan ekonomi berkaitan dengan perubahan-perubahan pada volume dan tingkat investasi, khususnya investasi riil (barang modal fisik yang bersifat tetap). Dengan kata lain investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik perorangan maupun kesejahteraan masyarakat.

Todaro and Smith (2003: 92) menjelaskan bahwa salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), yaitu semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* dan pendapatan dikemudian hari. Tidak berlebihan apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipacu oleh banyak faktor seperti investasi, kebijakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tingkat pertumbuhan penduduk, angkatan kerja dan kemajuan teknologi (Todaro and Smith, 2003: 96)

**Tabel. I.4**  
**Rata-rata Pengeluaran Pembangunan (Investasi Pemerintah)**  
**Kab/Kota Provinsi NAD 2001-2007 (Juta Rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Aceh Barat	710.98	761.05	801.17	909.51	931.91	950.89	983.96
2	Aceh Barat Daya	-	-	-	-	634.50	654.09	650.28
3	Aceh Besar	1,171.54	1,227.14	1,484.59	1,426.93	1,403.30	1,554.05	1,693.83
4	Aceh Jaya	-	-	-	794.71	823.09	874.74	1,010.53
5	Aceh Selatan	512.13	567.33	760.96	855.71	853.83	987.47	1,117.11
6	Aceh Singkil	-	-	-	488.27	565.13	552.08	555.58
7	Aceh Tengah	886.43	871.78	855.33	1,041.33	1,397.78	1,396.55	1,164.08
8	Aceh Tenggara	-	-	-	315.13	1,620.31	671.05	4,301.17
9	Aceh Timur	890.76	497.66	2,956.36	6,151.91	4,684.34	3,387.97	3,837.60
10	Aceh Utara	5,063.49	8,961.48	10,284.98	7,720.91	4,326.74	5,201.37	7,498.05
11	AcehTamiang	-	-	-	488.21	441.70	493.70	523.43
12	Banda Aceh	2,564.94	3,181.87	2,996.26	3,455.08	1,167.60	1,648.27	2,290.00
13	Bener Meriah	-	-	-	328.61	412.03	558.22	1,514.07
14	Bireun	-	-	-	4,209.51	4,731.91	1,350.89	923.96
15	Gayo Lues	-	-	-	407.15	672.09	501.67	556.17
16	Langsa	-	-	-	954.09	834.21	1,435.66	1,366.82
17	Lhokseumawe	-	-	-	1,155.48	1,264.39	1,489.21	1,744.15
18	Nagan Raya	-	-	-	523.77	609.21	650.22	692.10
19	Pidie	578.01	664.15	768.88	825.91	1,252.26	1,269.62	1,460.48
20	Sabang	612.09	858.22	1,214.07	1,394.71	1,223.09	1,478.74	1,510.53
21	Simeulue	-	-	-	706.40	689.89	789.25	897.35
	Jumlah	12,990.37	17,590.68	22,122.60	34,153.33	30,539.31	27,895.71	36,291.25
	Rata-rata	1,443.37	1,954.52	2,458.07	1,707.67	1,454.25	1,328.37	1,728.15

*Sumber : BPS NAD berbagai terbitan, data diolah*

Berdasarkan data diatas rata-rata pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat berfluktuatif tahun 2001 sebesar 1.443,37 juta rupiah, 1.954,52 juta rupiah pada tahun 2002, 2.458,07 juta rupiah tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar 1.707,67 juta rupiah kemudian tahun 2005 sebesar 1.454,25 juta rupiah dan masing-masing sebesar 1.328,27 juta rupiah dan 1.728,15 juta rupiah pada tahun 2006 dan tahun 2007.

Pertumbuhan penduduk terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memandang sebagai faktor produksi, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (*labour force*). Semakin banyak angkatan kerja semakin meningkat tenaga produktif, sehingga akan meningkatkan produksi. Di lain pihak semakin bertambah jumlah penduduk akan meningkatkan produksi barang dan jasa yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pasar. Dengan demikian, maka pengembangan kesempatan kerja merupakan implikasi dari masalah meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja dari tahun ke tahun. Tabel berikut akan menggambarkan jumlah angkatan kerja di Provinsi NAD.



**Tabel 1.5**  
**Jumlah Rata-rata Angkatan Kerja**  
**Kab/Kota Provinsi NAD Tahun 2001-2007 (jiwa)**

No.	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Aceh Barat	210797	187028	97137	62975	64666	74559	71387
2	Aceh Barat Daya	0	0	0	35564	49380	54740	53146
3	Aceh Besar	153700	153700	153700	114669	124279	121195	118405
4	Aceh Jaya	0	0	0	33300	27372	31507	30589
5	Aceh Selatan	127329	41970	113494	63497	85561	85639	83144
6	Aceh Singkil	0	0	0	48876	55558	58208	56513
7	Aceh Tengah	167672	136307	167672	140827	90549	85997	83486
8	Aceh Tenggara	98388	92733	99552	62406	72319	83118	80697
9	Aceh Timur	242754	281116	209487	111532	127574	128349	124611
10	Aceh Utara	453766	453766	283434	189470	205549	210101	204977
11	AcehTamiang	0	0	0	83995	110234	97443	94605
12	Banda Aceh	104700	140952	104700	86110	33811	74169	57771
13	Bener Meriah	0	0	0	0	58687	59504	43042
14	Bireun	0	0	0	169473	154783	159607	154958
15	Gayo Lues	0	0	0	26743	29718	36280	35223
16	Langsa	0	0	0	48770	55175	50007	13247
17	Lhokseumawe	0	0	0	51858	69737	56463	48550
18	Nagan Raya	0	0	0	44586	50528	65409	634504
19	Pidie	179055	179055	179055	202514	228378	223849	218388
20	Sabang	13039	13079	13079	12579	14669	13644	72009
21	Simeulue	0	0	0	29229	33928	34436	33433
	<b>Jumlah</b>	<b>1751200</b>	<b>1679706</b>	<b>1421310</b>	<b>1618973</b>	<b>1742455</b>	<b>1804224</b>	<b>2312685</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>175120</b>	<b>167971</b>	<b>142131</b>	<b>80949</b>	<b>82974</b>	<b>85915</b>	<b>115634</b>

*Sumber: BPS NAD berbagai terbitan, data diolah*

Todaro dan Smith (2003:98) mengatakan bahwasanya sumber kemajuan ekonomi bisa meliputi berbagai macam faktor, akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan bisa menaikkan

produktivitas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan selama tahun fiskal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul:

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007”

## **1.2 Batasan Masalah**

Mengingat permasalahan daerah yang demikian luas, maka ruang lingkup pembahasan penelitian ini hanya dibatasi dengan meneliti:

1.2.1 Menganalisis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dibatasi faktor pengeluaran pembangunan, investasi swasta meliputi PMDN/PMA dan tenaga kerja di daerah. Data pertumbuhan (PDRB) dengan harga konstan inilah yang akan digunakan mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1.2.2 Data yang digunakan tahun 2007 dengan harga konstan tahun 2000.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka secara ringkas dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu

- 1.3.1 Seberapa besar investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007.
- 1.3.2 Seberapa besar pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007.
- 1.3.3 Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007.

### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah.

- 1.4.1 Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 1.4.2 Untuk menganalisis pengaruh Investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 1.4.3 Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- 1.5.1 Sebagai gambaran bagi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang pengaruh pengeluaran pembangunan, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka penentuan arah dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi.
- 1.5.2 Sebagai bahan informasi awal yang dapat dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 1.5.3 Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.